

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA





Peta Pembinaan Provinsi Kalimantan Utara

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88512-8-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Adinda Aura Salsabil, S.Stat
2. Arzad Sectio, S.IP, MPA

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BULUNGAN	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN MALINAU	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN NUNUKAN	19
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	20
Aspek Satuan Inovasi Daerah	21
D. KABUPATEN TANA TIDUNG	27
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	27
Aspek Satuan Inovasi Daerah	28
E. KOTA TARA KAN	36
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	36
Aspek Satuan Inovasi Daerah	37

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

A. KABUPATEN BULUNGAN	44
B. KABUPATEN MALINAU	44
C. KABUPATEN NUNUKAN	44
D. KABUPATEN TANA TIDUNG	44
E. KOTA TARA KAN	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bulungan

Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bulungan

Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bulungan

Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bulungan

Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bulungan

Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan

Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Malinau

Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Malinau

Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Malinau

Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Malinau

Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Malinau

Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Malinau

Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Malinau

Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Malinau

Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Malinau

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malinau

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nunukan

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nunukan

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Nunukan

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Nunukan

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Nunukan

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nunukan

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tana Tidung

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tana Tidung

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Tidung

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tarakan

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tarakan

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Tarakan

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Tarakan

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Tarakan

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Tarakan

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Tarakan

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Tarakan

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Tarakan

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Tarakan

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Bulungan beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Malinau beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Nunukan beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Tana Tidung beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kota Tarakan beserta Skor Kematangannya

The Page Left is Blank

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan

inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

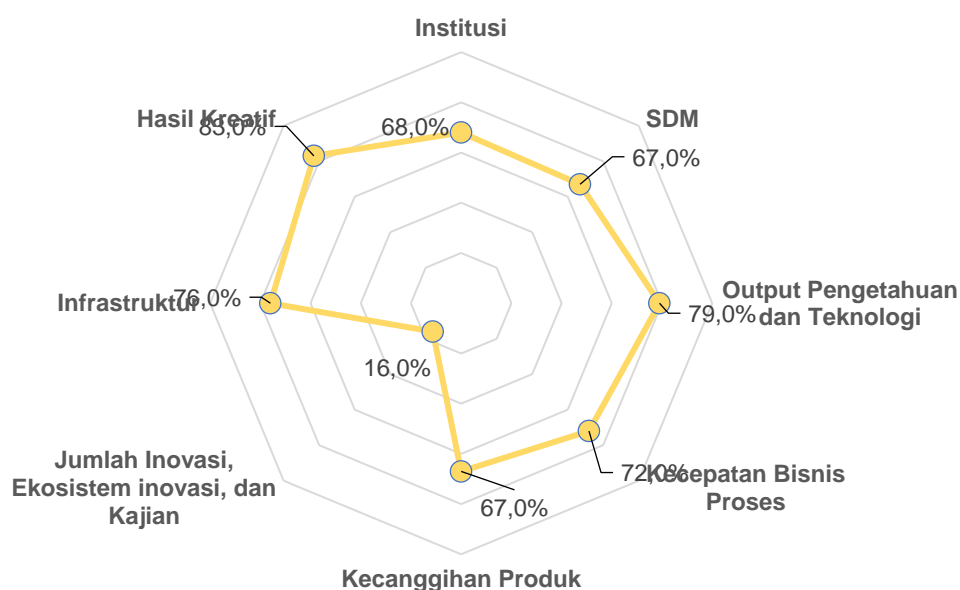
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
		Roadmap SiDA
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

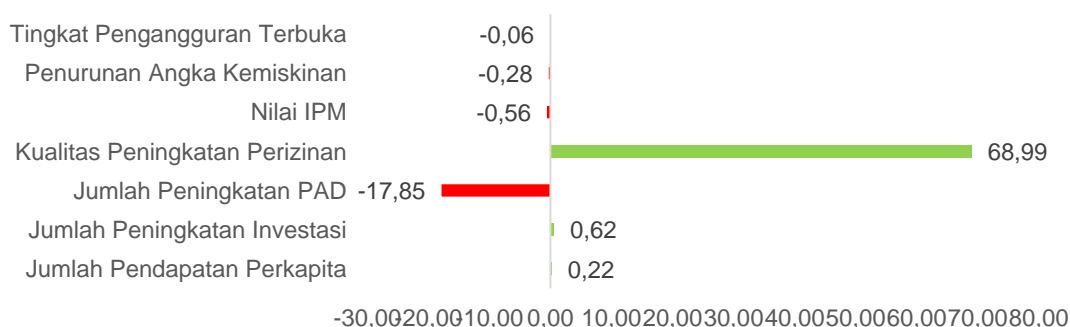
A. KABUPATEN BULUNGAN



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bulungan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bulungan memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 84,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih rendah, hanya sebesar 16,0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bulungan

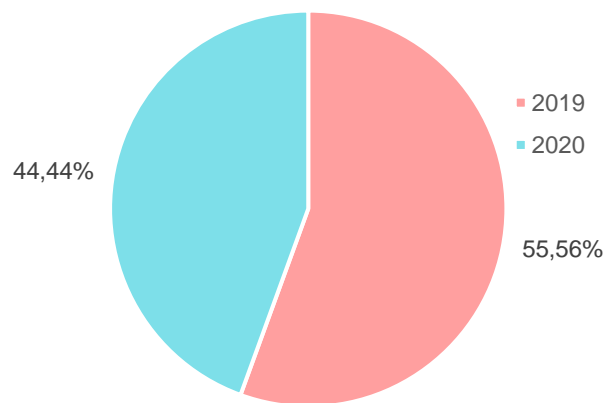
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bulungan sudah mengalami perkembangan yang signifikan walaupun beberapa di antaranya masih belum signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 17,85%, dimana nilai tersebut masih sangat kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan tercatat naik

sebesar 0,28% di mana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0,02%. Pemerintah Kabupaten Bulungan juga mengalami penurunan pada Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,56% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi sebesar 0% atau tetap.

Angka Kualitas Peningkatan Perizinan Kabupaten Bulungan terlihat meningkat pesat sebesar 68,99%, sudah sangat melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Demikian pula dengan capaian Jumlah Peningkatan Investasi dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Bulungan meningkat 0,62% dan melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yaitu sebesar 0,45%. Adapun Jumlah Pendapatan Perkapita di Kabupaten Bulungan naik sebesar 0,22%, serta sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana jumlah pendapatan perkapita turun sebesar 1,85%. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun sebesar 0,06%. Dengan kata lain, pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2019. Nilai tersebut sudah mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

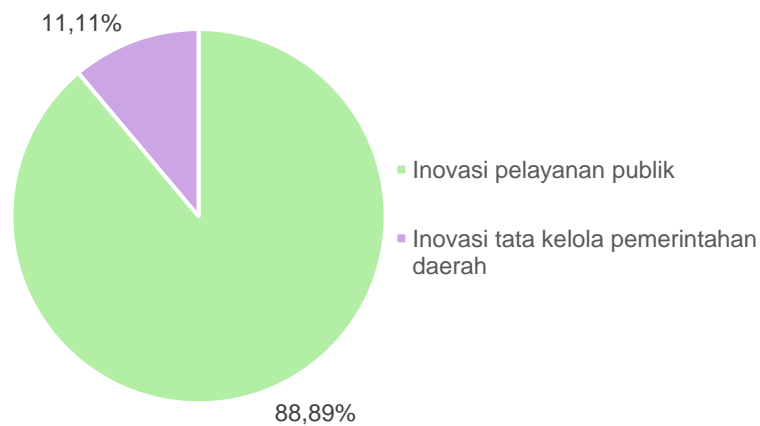
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, terdapat proporsi yang berbeda antara inovasi yang dilaporkan dan telah diterapkan oleh Kabupaten Bulungan sejak tahun 2019 dan 2020. Dari total 9 inovasi yang dilaporkan, terdapat 5 (55,56%) inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019 dan 4 (44,44%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

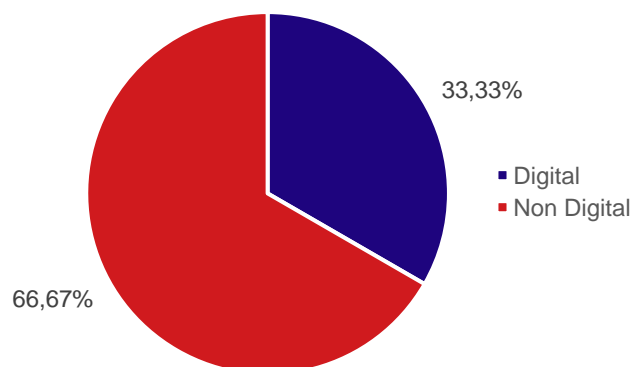
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Berdasarkan bentuk inovasi, Kabupaten Bulungan memiliki dua bentuk inovasi, yaitu inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Dari sisi proporsi, bentuk inovasi didominasi oleh inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 8 (88,89%) inovasi. Sementara itu, 1 (11,11%) inovasi tersisa yang dilaporkan oleh Kabupaten Bulungan merupakan inovasi tata kelola Pemerintahan daerah.

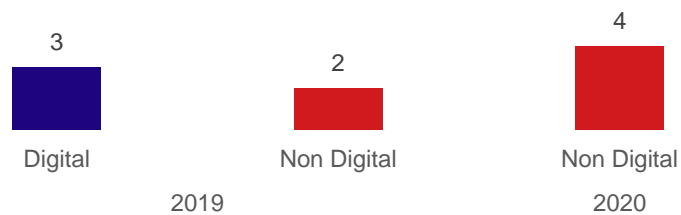
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 berdasarkan jenis inovasinya, 3 (33,33%) inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Bulungan merupakan inovasi digital dan 6 (66,67%) inovasi sisanya adalah inovasi non digital.

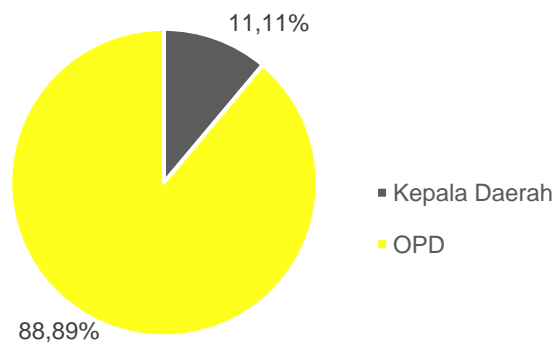
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bulungan

Secara umum, jumlah inovasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa 5 inovasi diterapkan pada tahun 2019 dan 4 inovasi sisanya diterapkan pada tahun 2020. Lebih lanjut, dari 5 inovasi yang diterapkan pada tahun 2019, 3 di antaranya merupakan inovasi digital dan 2 inovasi sisanya merupakan inovasi non digital. Di sisi lain, keseluruhan inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 merupakan inovasi non digital.

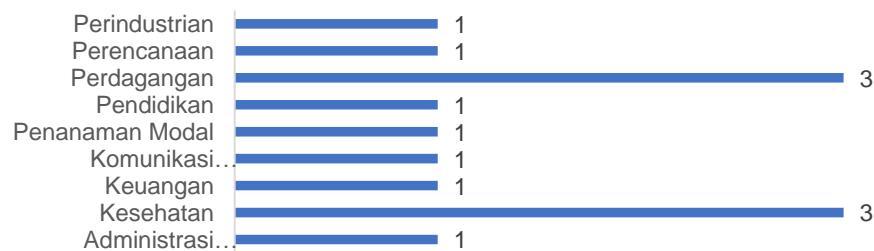
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bulungan

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bulungan pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu sejumlah 8 (88,89%) inovasi. Lebih lanjut, sebanyak 1 (11,11%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Di sisi lain, inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat, ASN, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

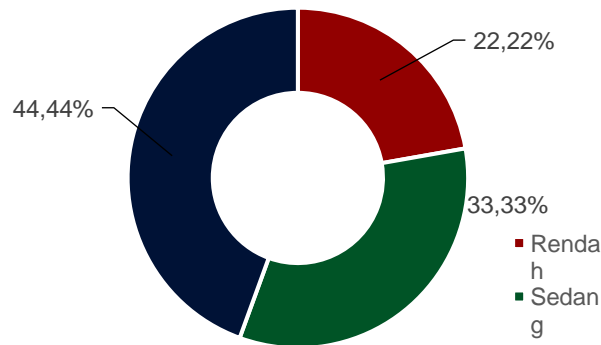
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bulungan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Bulungan berdasarkan urusan pemerintahan tersebar pada sembilan urusan, di antaranya adalah urusan perindustrian, perencanaan, perdagangan, pendidikan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, keuangan, kesehatan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan perdagangan dan kesehatan, yaitu sebanyak masing-masing 3 inovasi. Sementara itu, inovasi pada 7 urusan lainnya memiliki jumlah inovasi yang sama, yakni sebanyak masing-masing 1 inovasi.

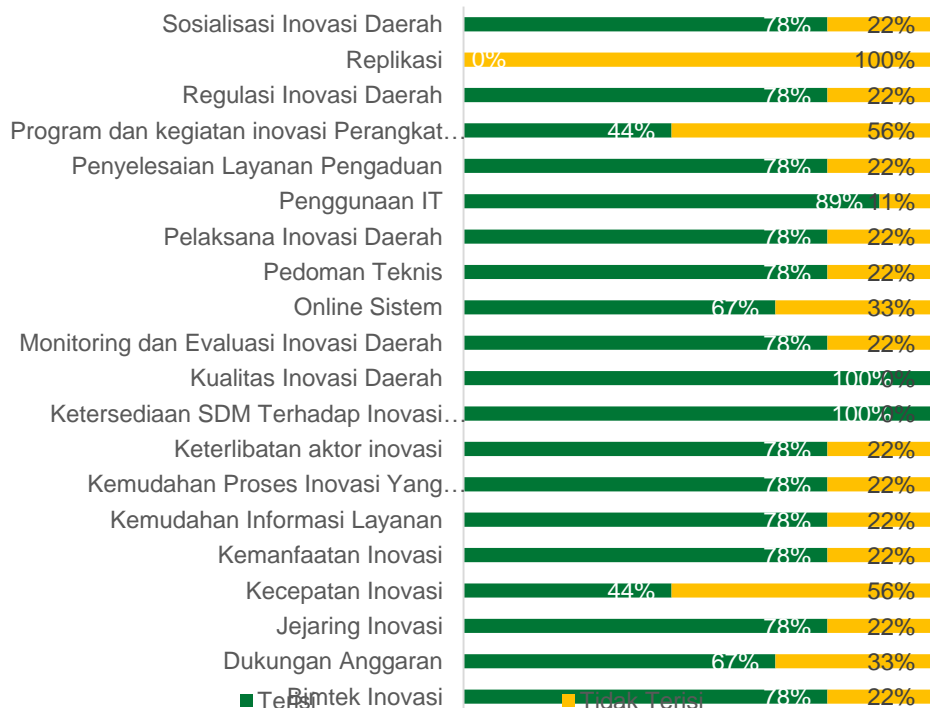
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bulungan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sejumlah 4 (44,44%) inovasi. Selain itu, terdapat 3 (33,33%) inovasi yang memiliki skor sedang dan 2 (22,22%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

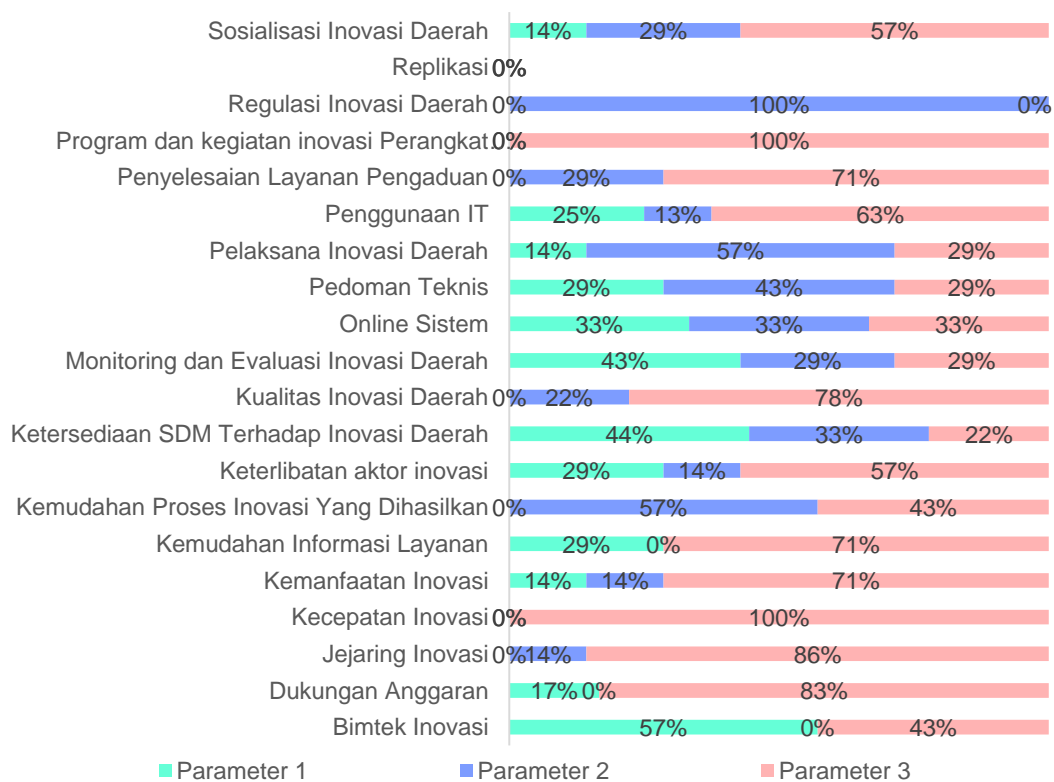
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan

Dari 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bulungan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 27,78% sedangkan 72,22% lainnya telah terisi data pendukung. Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas sebagian besar indikator memiliki persentase keterisian sebesar 78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bulungan telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Dari keseluruhan indikator tersebut, hanya dua indikator dengan persentase keterisian 100%, yakni indikator kualitas inovasi daerah dan ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Namun, di sisi lain masih terdapat satu indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung sebesar 0%, yaitu indikator replikasi. Dengan kata lain seluruh inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD serta Kecepatan Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 57%. Dengan kata lain, 57% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi.

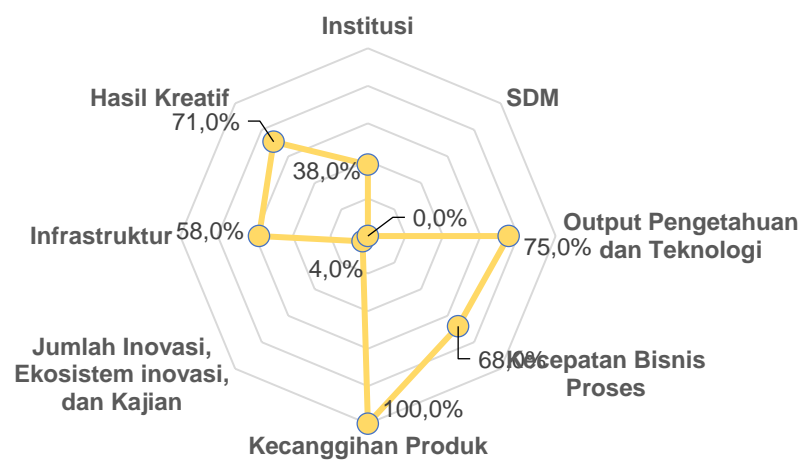
j. Daftar Inovasi Kabupaten Bulungan beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Bulungan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
The New Normal di Pusat Perbelanjaan PANEN SQUARE	17
New Normal Sektor Pasar Tradisional	15
ESWePe - Elektronik Status Wajib Pajak Daerah (BP2RD)	92
SEKINJAU SEMISA - Pelayanan Pembuatan Dokumen Kependudukan (Disdukcapil)	93
SIMOTIVASI - Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Bagian Pembangunan Setda Kabupaten)	106

Gertagmas PMKJN – Gerakan Serentak Petugas dan Masyarakat Peduli Masalah Kesehatan Jiwa/Napza (UPT. PKM Bumi Rahayu)	112
KACCER – Layanan Wisata Kunjungan Anak Cerdas dan Ceria (Dinas Arsip dan Perpustakaan)	122
Kenali Risiko Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (UPT. PKM Long Beluah)	81
PANTAU APP – Media Informasi Interaktif Berbasis Android bagi Masyarakat Kabupaten Bulungan (Dinas Komunikasi dan Informasi)	134

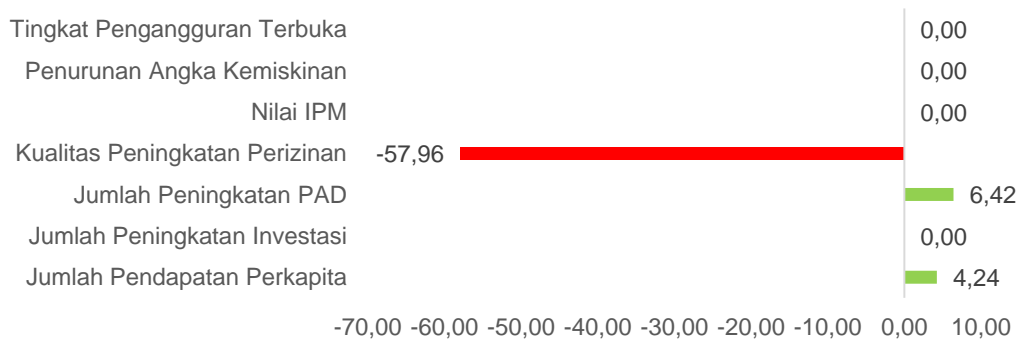
B. KABUPATEN MALINAU



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Malinau

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Malinau memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 100,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Kecanggihan Produk sudah mencapai skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM masih sangat rendah, bahkan menunjukkan angka 0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



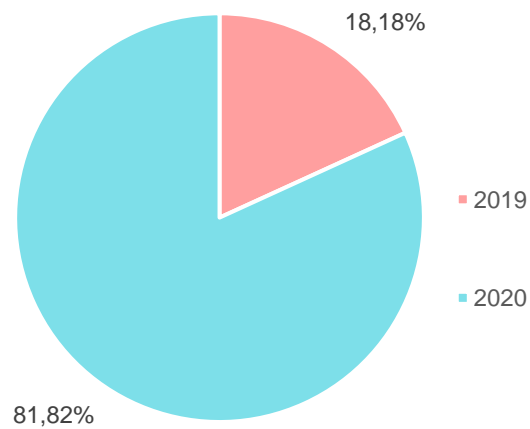
Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Malinau

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Malinau belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 57,96%, dimana nilai tersebut masih jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami perubahan, di mana angka tersebut tidak memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Demikian pula dengan Jumlah Peningkatan Investasi yang juga tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0,45%. Jumlah Peningkatan PAD juga terlihat naik sebesar 6,42%, namun masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya naik sebesar 8%.

Meskipun beberapa capaian di Kabupaten Malinau masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah, namun sebagian capaian lainnya sudah memenuhi. Sebagai contoh, nilai Indeks Pembangunan Manusia sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana nilai IPM tidak mengalami perubahan atau tetap. Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang juga tidak mengalami perubahan. Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,92%. Terakhir, Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Malinau naik sebesar 4,24%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan yang sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana Jumlah Pendapatan Perkapita turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

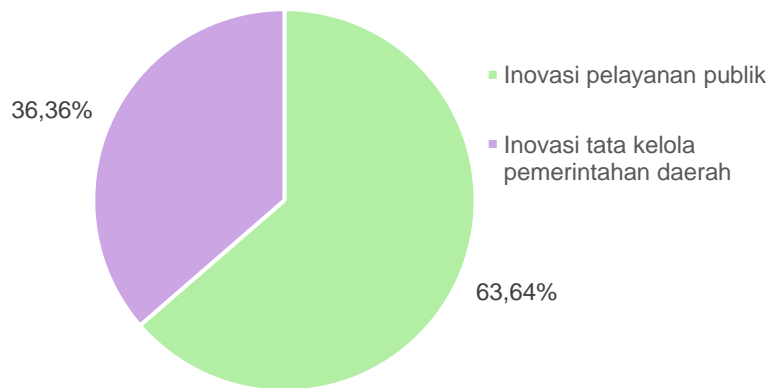
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Malinau

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Malinau telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 9 (81,82%) inovasi dari 11 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 2 (18,18%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

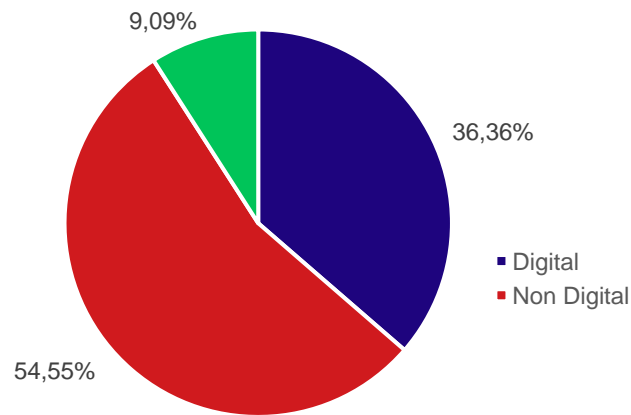
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Malinau

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Malinau, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 7 (63,64%) inovasi dan 4 (36,36%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan daerah.

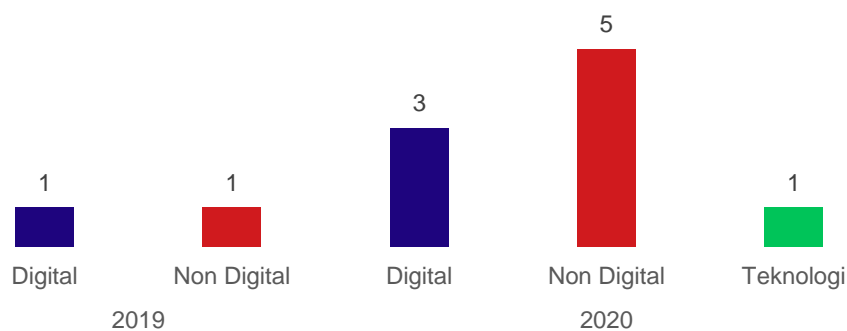
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Malinau

Berdasarkan jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Malinau pada tahun penilaian 2021 terdiri atas tiga jenis, yaitu inovasi digital, inovasi non digital, dan inovasi teknologi. Dilihat dari proporsinya, 6 (54,55%) dari 11 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Malinau merupakan inovasi non digital, 4 (36,36%) inovasi merupakan inovasi digital, dan 1 (9,09%) inovasi sisanya merupakan inovasi teknologi.

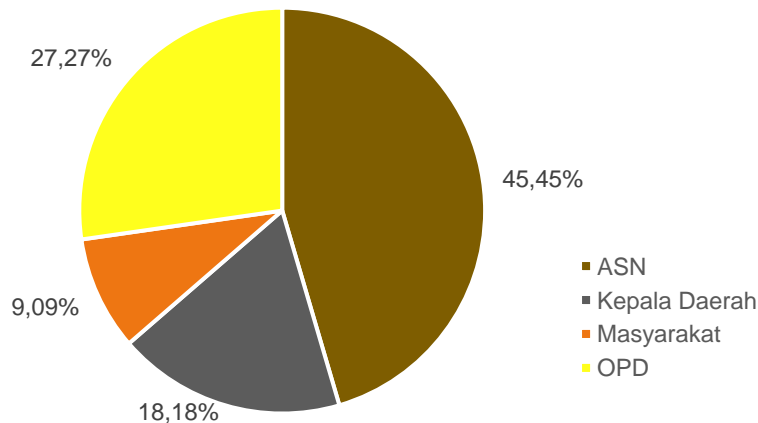
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Malinau

Secara umum jumlah inovasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dan mengalami perkembangan jenis inovasi. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa inovasi pada tahun 2019 hanya terdiri atas inovasi digital dan non digital dan pada tahun 2020 jenis inovasi bertambah satu yaitu inovasi teknologi. Dari sisi jumlah, baik inovasi digital dan non digital meningkat pada tahun 2020. Jumlah inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2019 inovasi adalah sebanyak 1 inovasi, kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 3 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital yang juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 hanya terdapat 1 inovasi non digital yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 bertambah menjadi 5 inovasi. Selanjutnya, pada tahun 2020 juga terdapat 1 inovasi teknologi.

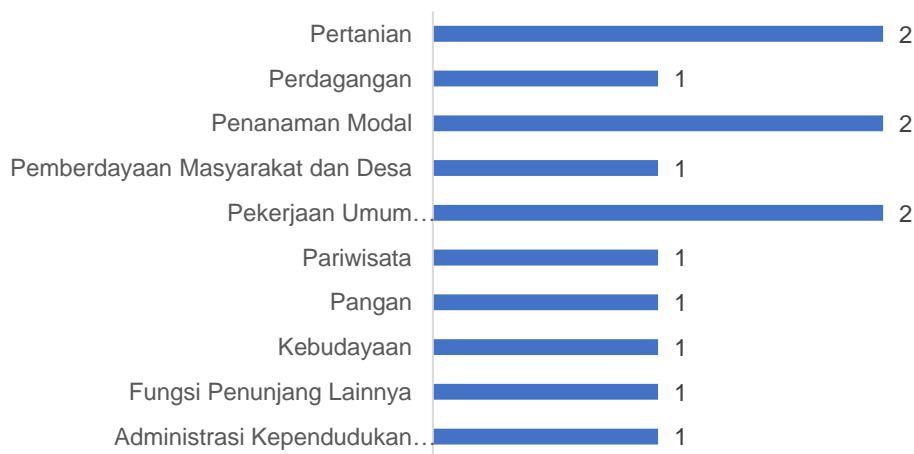
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Malinau

Gambar di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Malinau diinisiasi oleh beragam unsur, di antaranya adalah ASN, Kepala Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Malinau pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 5 (45,45%) inovasi. Sementara itu, sebanyak 3 (27,27%) inovasi diinisiasi oleh OPD, 2 (18,18%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, dan 1 (9,09%) sisanya diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

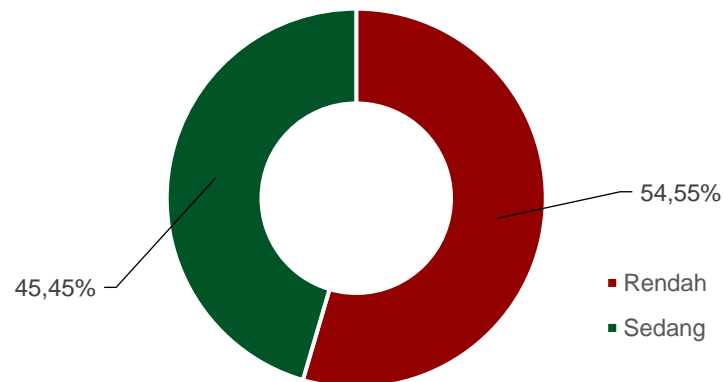


Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Malinau

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Malinau berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi di Kabupaten Malinau adalah inovasi pada urusan pertanian, penanaman modal, serta pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 2 inovasi pada masing-masing urusan. Selanjutnya, pada urusan perdagangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pariwisata, pangan, kebudayaan, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, serta fungsi penunjang lainnya terdapat masing-masing 1 inovasi yang dilaporkan.

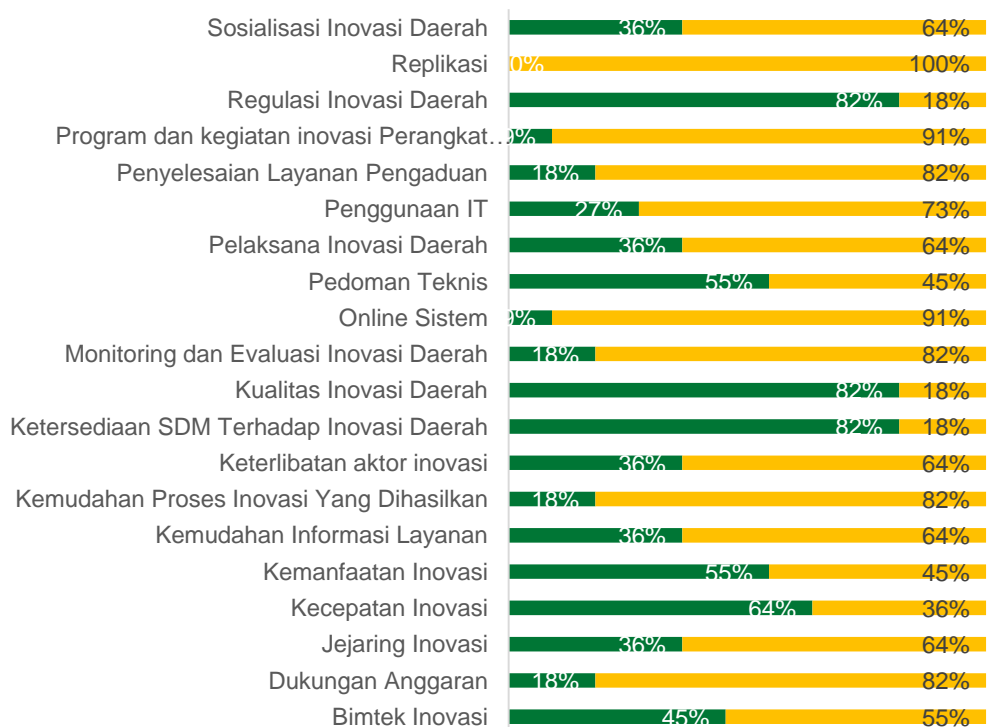
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Malinau

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi mencapai skor kematangan rendah dan sedang, dimana terdapat 6 (54,55%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan 5 (45,45%) inovasi sisanya mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

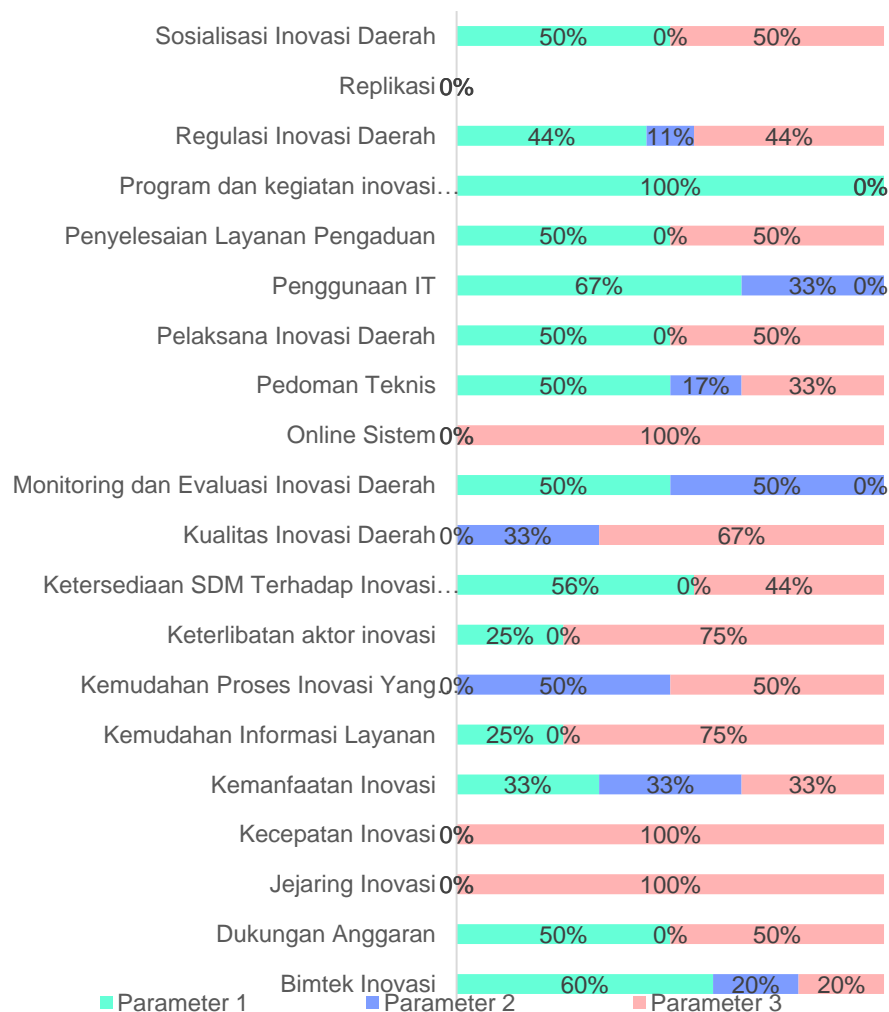
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malinau

Dari 19 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Malinau, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 61,82% sedangkan 38,18% lainnya telah terisi data pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterisian data pendukung dalam indikator satuan inovasi daerah di Kabupaten Malinau masih rendah, sehingga perlu menjadi perhatian. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah dengan persentase keterisian sebanyak 82%. Artinya, 82% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Malinau telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Di sisi lain indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0%. Artinya, masih belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung, diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator *Online System*, *Kecepatan Inovasi*, dan *Jejaring Inovasi* yaitu masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator *Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah*

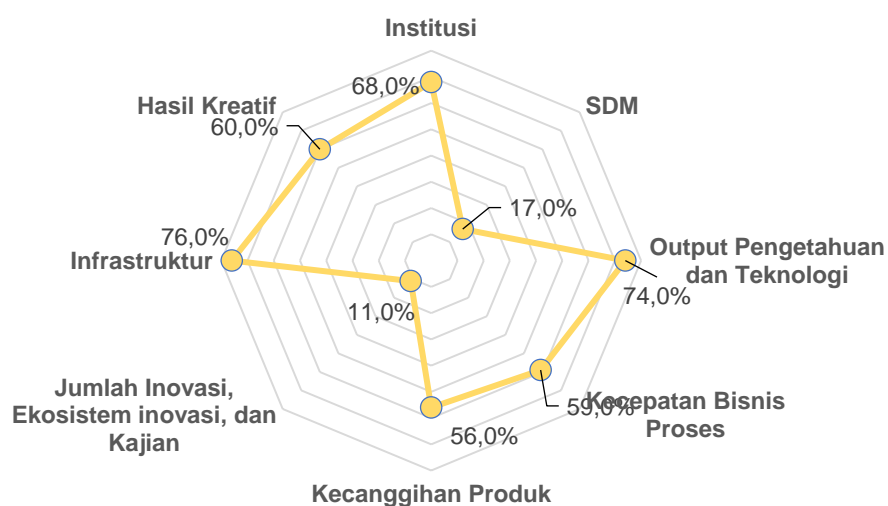
serta Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, dengan persentase sebesar 50%. Artinya, setengah dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Malinau beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Malinau beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pasar Tradisional Inai	0
DPMPTSP menuju New Normal dan Aman Covid-19	25
Panen Pedet Upsus Siwab 2019 / 2020	61
Sistem Pelayanan Perizinan Online SIPADUMANIS	90
Beras Daerah/RASDA	76
Menggali Potensi Alam dan Budaya	58
Gerdema Taruna (Gerakan Desa Membangun Tata Ruang Terencana)	41
PW-RT (Pemetaan wilayah-RT)	41
MALINAU BISA (Malinau Berinovasi Untuk Desa)	0
Sistem Informasi Desa Long Pada (https://longpada.desa.id/first/)	57
Sistem Informasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Malinau (SIPRODA)	38

C. KABUPATEN NUNUKAN

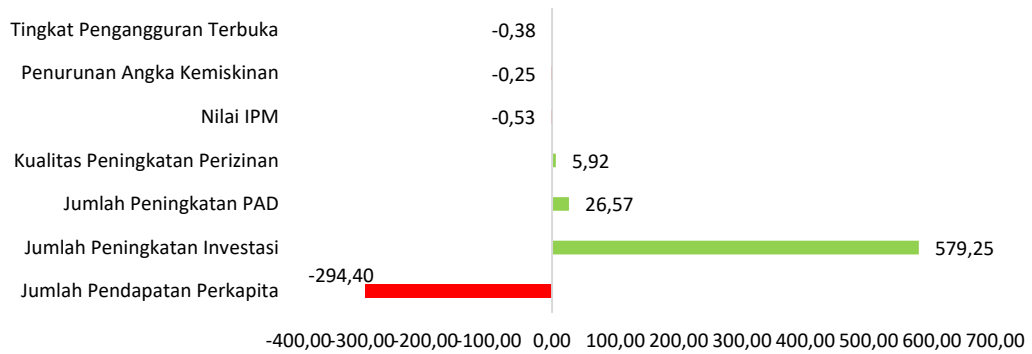


Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nunukan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Nunukan memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 76,0%. Artinya, secara umum indikator -

indikator pada variabel Infrastruktur sudah mencapai skor yang cukup mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yakni berada pada skor 11%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



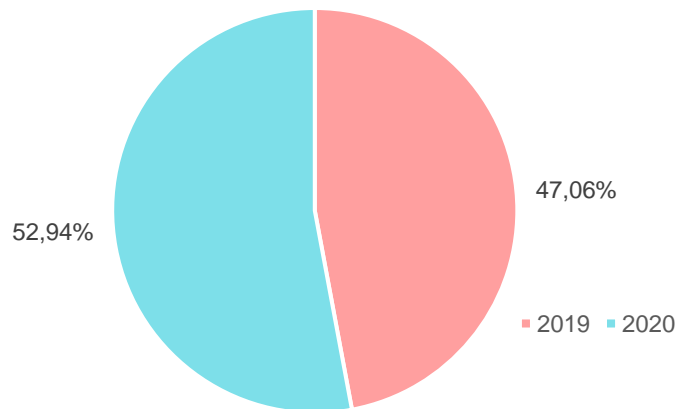
Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nunukan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nunukan cukup mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa penurunan pada beberapa indikator. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan yang paling signifikan, di mana Jumlah Pendapatan Perkapita turun sebanyak 294,40% pada tahun 2020, hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Nilai tersebut tentunya sangat jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun 1,85%. Selanjutnya, indikator lainnya seperti Angka Kemiskinan menunjukkan kenaikan sebesar 0,25%. Angka tersebut masih belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik sebesar 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar 0,53% dimana nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Adapun indikator-indikator yang sudah mencapai atau melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di antaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Peningkatan PAD, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Bagan di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan turun sebesar 0,38%. Dengan kata lain, jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0,38% dibandingkan dengan tahun 2019. Angka tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92%. Kualitas Peningkatan Perizinan terpantau naik sebesar 5,92%, sedikit di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana terdapat kenaikan sebesar 5%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan PAD terpantau naik 26,57% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Angka tersebut sudah cukup melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Peningkatan PAD naik sebesar 8%. Terakhir, indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Jumlah Peningkatan Investasi. Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebesar 579,25%, meningkat lebih dari 5 kali dibandingkan pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, angka tersebut sudah sangat melampaui angka standarnya, dengan peningkatan investasi sebesar 4%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

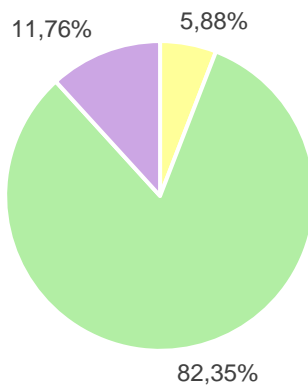
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nunukan telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 9 (52,94%) inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 8 (47,06%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

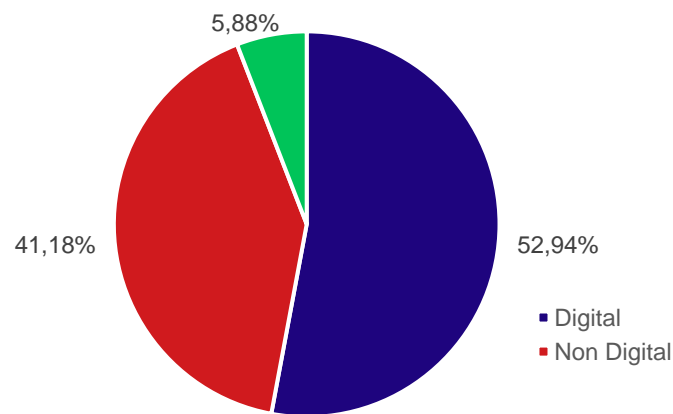


- Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- Inovasi pelayanan publik

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nunukan sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang terlapor adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 14 (82,35%) inovasi dari 17 inovasi. Sementara itu, 2 (11,76%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 1 (5,88%) inovasi lainnya adalah inovasi lainnya.

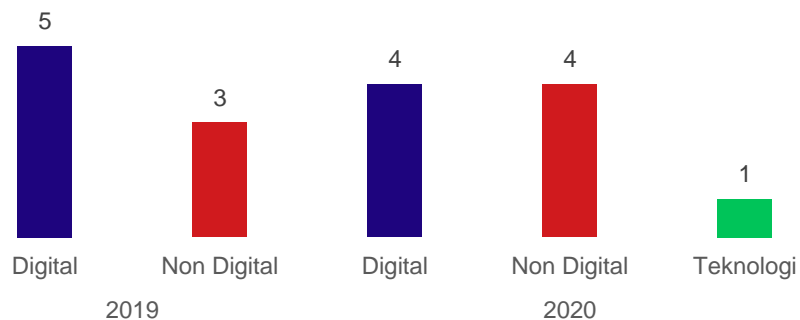
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (52,94%) dari 17 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Nunukan merupakan inovasi digital. Sementara itu, 7 (41,18%) inovasi merupakan inovasi non digital dan 1 (5,88%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

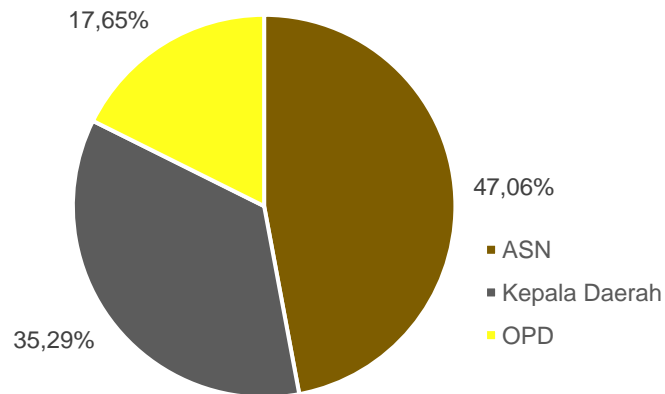
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Nunukan

Secara umum jumlah inovasi mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 serta terdapat penambahan jenis inovasi. Meskipun demikian, inovasi digital mengalami sedikit penurunan, di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 5 inovasi kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 4 inovasi. Sebaliknya, inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 terdapat 3 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi. Selain itu, pada tahun 2020 terdapat 1 inovasi teknologi, sedangkan pada tahun 2019 tidak ada inovasi teknologi yang dilaporkan.

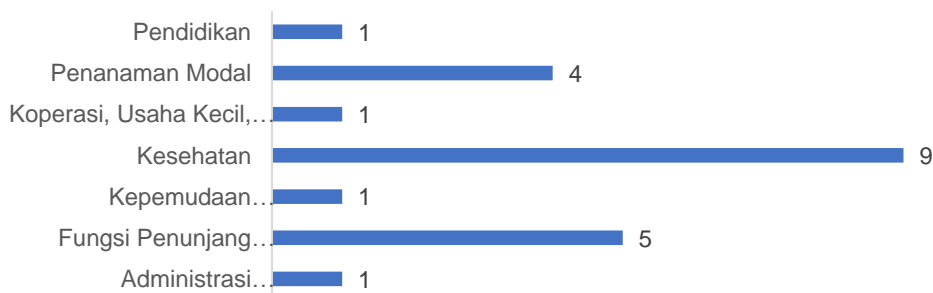
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nunukan

Inovasi pada Kabupaten Nunukan diinisiasi oleh tiga unsur, di antaranya adalah ASN, Kepala Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan gambar di atas, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 8 (47,06%) inovasi. Selanjutnya, 6 (35,29%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 3 (18%) inovasi sisanya diinisiasi oleh OPD. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

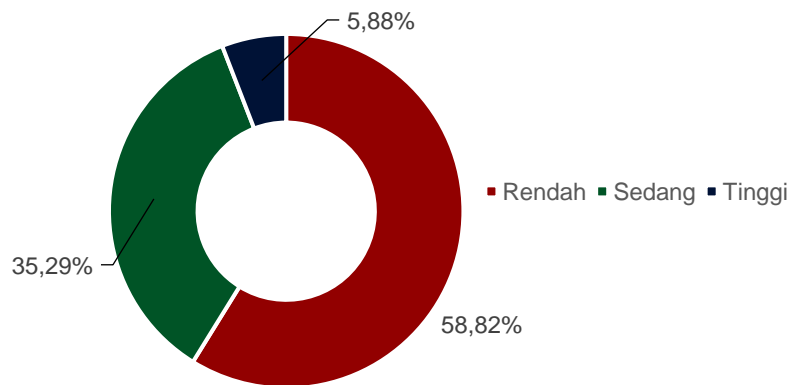
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Nunukan

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Nunukan tersebar pada 7 urusan berbeda. Urusan Kesehatan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 9 inovasi. Selanjutnya, terdapat 5 inovasi yang merupakan urusan Fungsi Penunjang Lainnya, dan 4 inovasi tergolong dalam urusan Penanaman Modal. Sementara itu, 4 urusan sisanya memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, di antaranya adalah urusan Pendidikan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

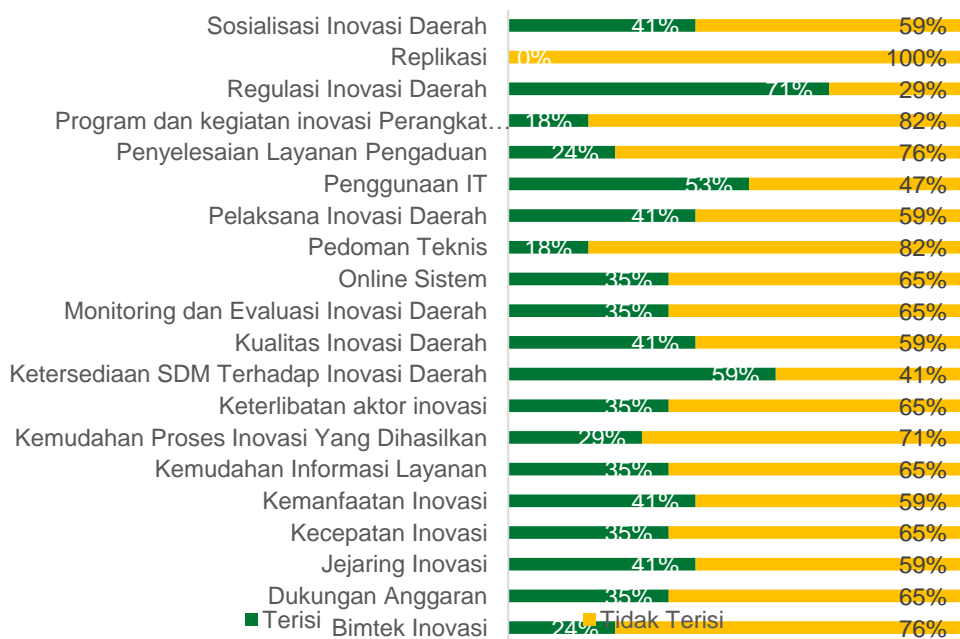
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Nunukan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Namun, hanya terdapat 1 (5,88%) inovasi dari 17 inovasi yang termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan tergolong ke dalam skor kematangan rendah, yaitu sebanyak 10 (58,82%) inovasi. Adapun 6 (35,29%) inovasi sisanya mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

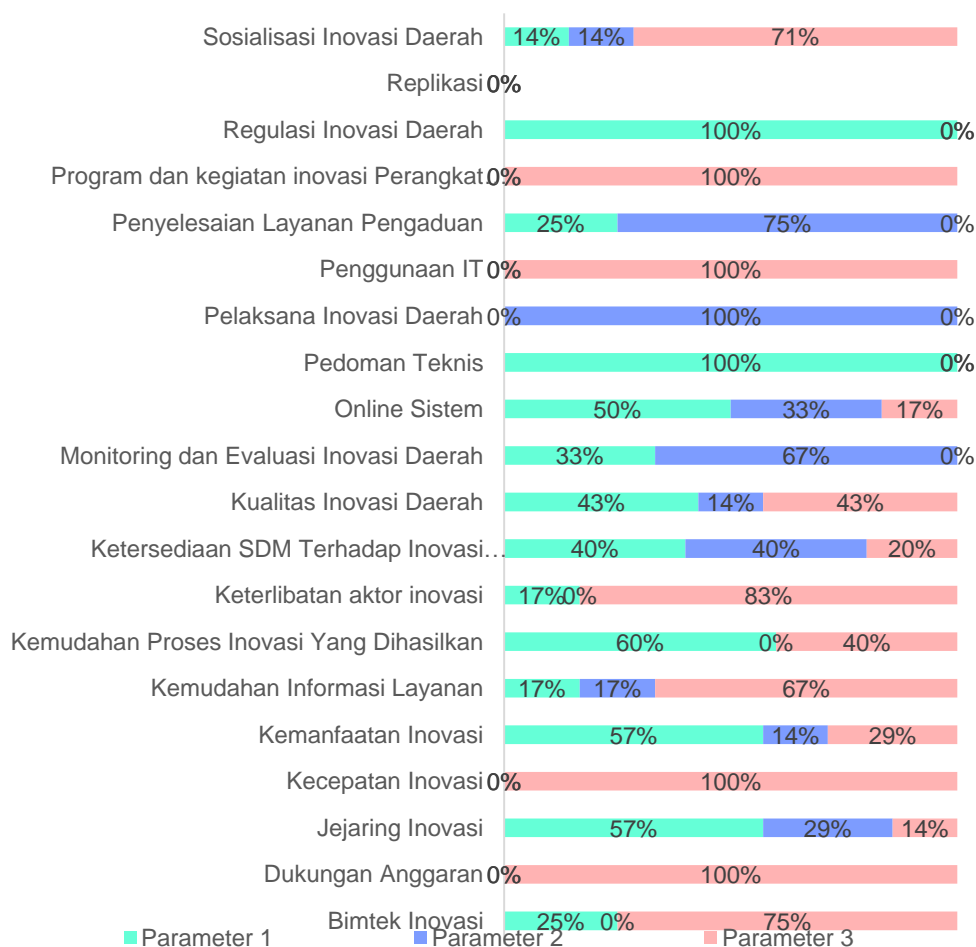
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nunukan

Dari 17 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nunukan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 64,41% sedangkan 35,59% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Regulasi Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian 71%. Artinya, 71% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nunukan telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Kecepatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran masing-masing sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 100%. Dengan kata lain, seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator

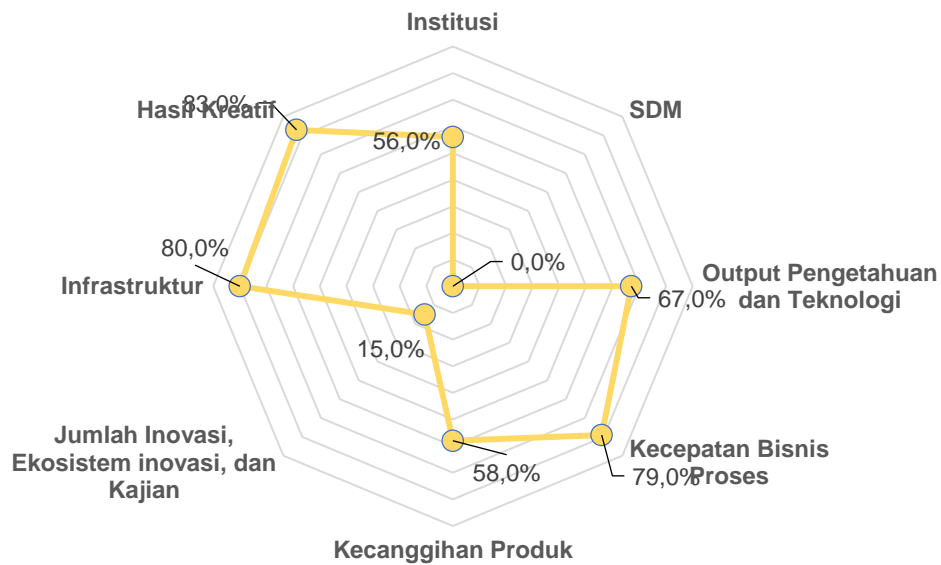
dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Pedoman Teknis masing-masing sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator-indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Nunukan beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Nunukan beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SEMPADAN (SISTEM PERIZINAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN)	8
Pelayanan Bersama (DPMPTSP Propinsi Kalimantan Utara dengan DPMPTSP Kabupaten Nunukan)	2
Pelayanan Pengaduan Prioritas Untuk Pungli dan Gratifikasi	6
Fasilitator OSS (Online Single Submission) di setiap Kecamatan dikabupaten Nunukan	4
Servis Point Kelurahan Kecamatan Nunukan	4
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan diluar jam Pelayanan dan/atau di Dalam Jam Pelayanan dan di Luar Tempat pelayanan	4
Gegas Wahana Perbatasan	2
LAPIU (LAYANAN PENGADUAN INFORMASI)	89
GPI	0
Evaluasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masa pandemi Covid-19	100
Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Via daring	83
SENAM YAMETO, KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT UNTUK GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)	68
Sayang Anak	72
REGISTRASI DAN KONSULTASI LAYANAN RUMAH SAKIT VIA ONLINE	89
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDATAAN, VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN MODAL KERJA BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK COVID – 19 SE KABUPATEN NUNUKAN	0
Si PatuH PerADuan (Sistem Pelayanan Terpadu Hukum Perkawinan dan Administrasi Kependudukan)	89
HANDLING COMPLAINT	0

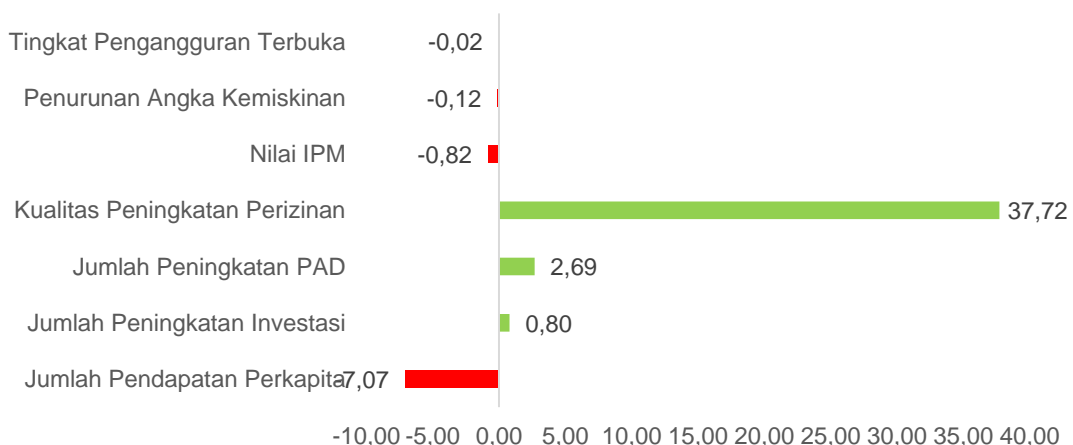
D. KABUPATEN TANA TIDUNG



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tana Tidung memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 76,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah mencapai skor yang cukup mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM masih sangat rendah, bahkan mencatat skor 0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih belum tercapai atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tana Tidung

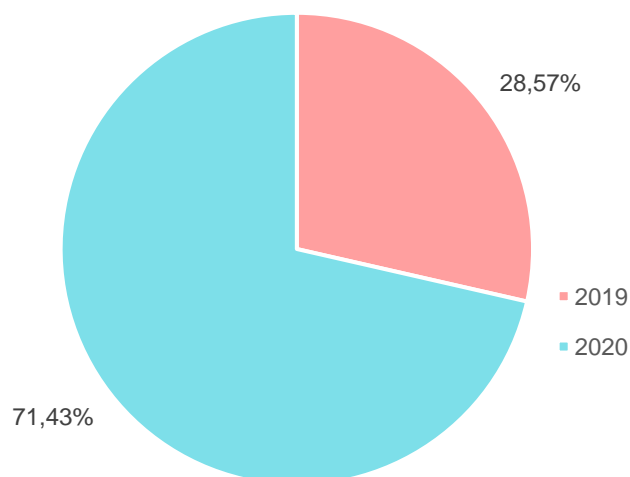
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tana Tidung cukup mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa penurunan pada beberapa indikator, yaitu Penurunan Angka Kemiskinan, nilai IPM, dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Jumlah Pendapatan Perkapita memiliki angka penurunan yang paling tinggi daripada indikator lainnya, yakni sebesar 7,07%. Jika dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun 1,85%, angka tersebut masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Nilai IPM juga tercatat turun sebesar 0,82%, Nilai tersebut masih belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana IPM tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, nilai Angka Kemiskinan terpantau naik sebesar 0,12%, di mana menurut standar nasional parameter indeks inovasi daerah Angka Kemiskinan seharusnya turun sebesar 0,02%.

Sebaliknya, Kabupaten Tana Tidung memiliki 4 indikator dengan capaian yang cukup baik. Kualitas Peningkatan Perizinan menjadi indikator dengan capaian terbaik, di mana terdapat peningkatan sebesar 37,72% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana Kualitas Peningkatan Perizinan meningkat sebesar 5%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi tercatat mengalami kenaikan 0,80% dan melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yakni naik sebesar 0,45%. Selain kedua indikator tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami perkembangan yang melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,02%, yang berarti bahwa tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 0,02% dibandingkan tahun 2019. Meskipun naik 0,02%, namun kenaikan tersebut sudah sesuai dengan standar di mana indikator tersebut naik sebesar 0,92%. Terakhir, Jumlah Peningkatan PAD juga mengalami peningkatan sebesar 2,69%, namun masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

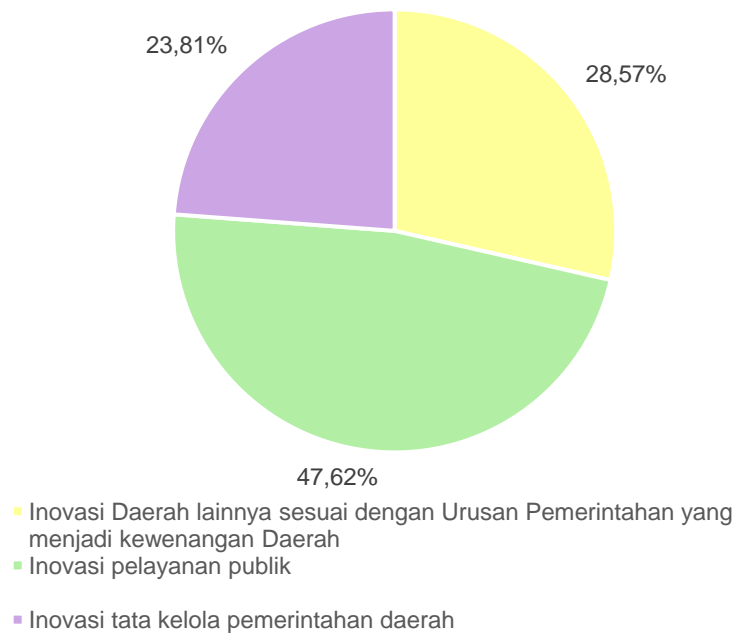


Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tana Tidung telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 15 (71,43%) inovasi dari 21

inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 6 (28,59%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

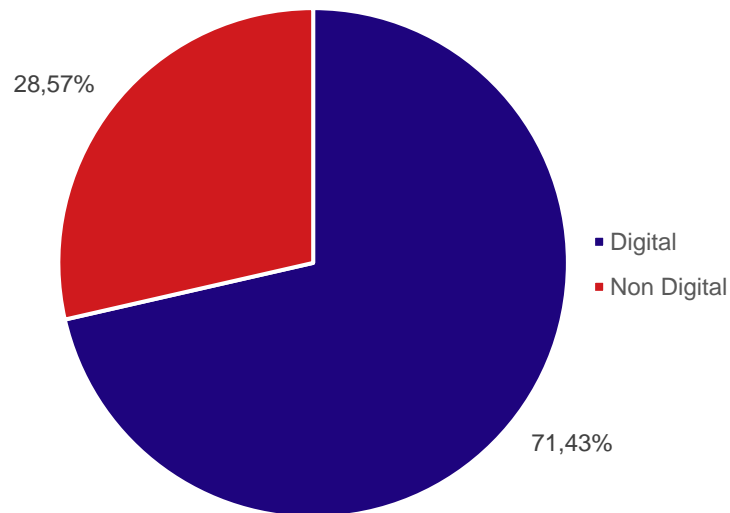
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tana Tidung sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang terlapor adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 10 (47,62%) inovasi dari 21 inovasi. Sementara itu, 6 (28,57%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 5 (23,81%) inovasi lainnya adalah inovasi lainnya.

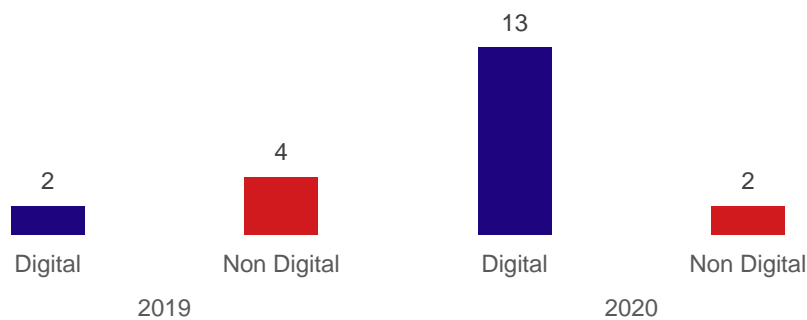
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kabupaten Tana Tidung terdiri atas Inovasi Digital dan Inovasi Non Digital. Sebanyak 15 (71,43%) dari 21 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Tana Tidung merupakan inovasi digital. Sementara itu, 6 (28,57%) inovasi sisanya merupakan inovasi non digital.

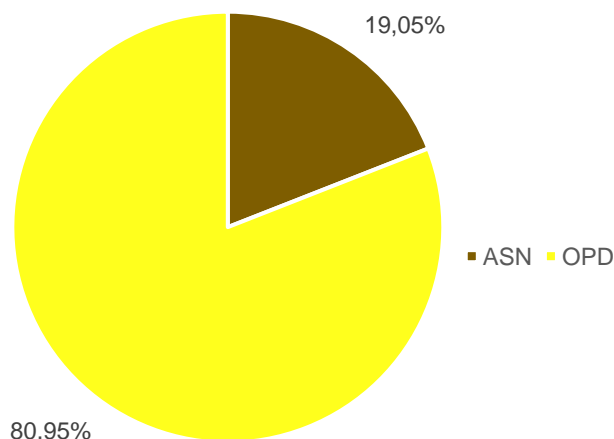
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tana Tidung

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Inovasi digital terlihat meningkat pesat, di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 13 inovasi. Di sisi lain, inovasi non digital mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 terdapat 4 inovasi non digital yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 menurun menjadi 2 inovasi digital.

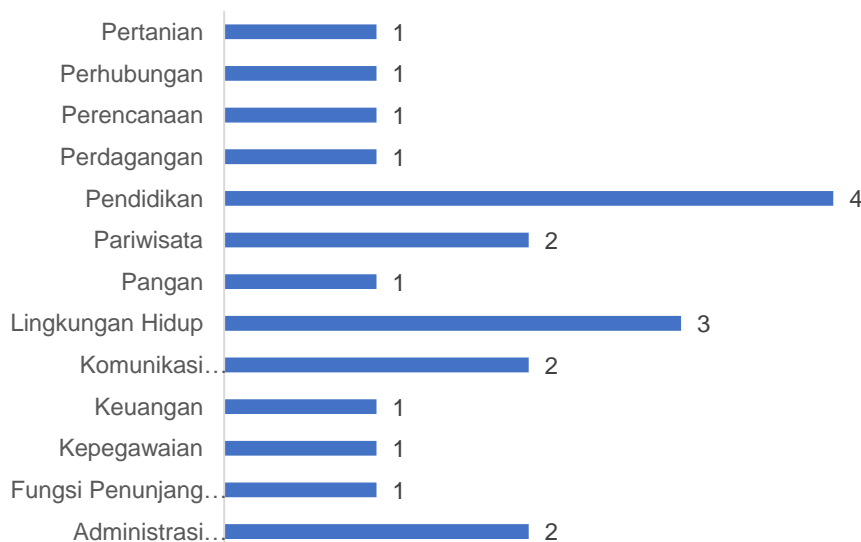
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tana Tidung

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi pada Kabupaten Tana Tidung hanya diinisiasi oleh dua unsur, di antaranya adalah ASN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 17 (80,95%) inovasi. Selanjutnya, 4 (19,05%) inovasi sisanya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, Kepala Daerah dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

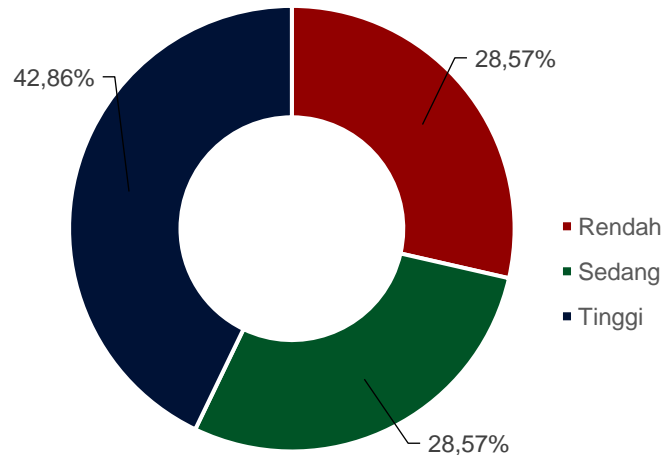


Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tana Tidung

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Tana Tidung tersebar pada 13 urusan berbeda. Urusan Pendidikan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 4 inovasi. Selanjutnya, terdapat 3 inovasi yang merupakan urusan Lingkungan Hidup. Adapun jumlah inovasi dalam urusan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 2 inovasi pada masing-masing urusan. Sementara itu, 8 urusan sisanya memiliki jumlah

inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, yaitu pada urusan Pertanian, Perhubungan, Perencanaan, Perdagangan, Pangan, Keuangan, Kepegawaian, dan Fungsi Penunjang Lainnya.

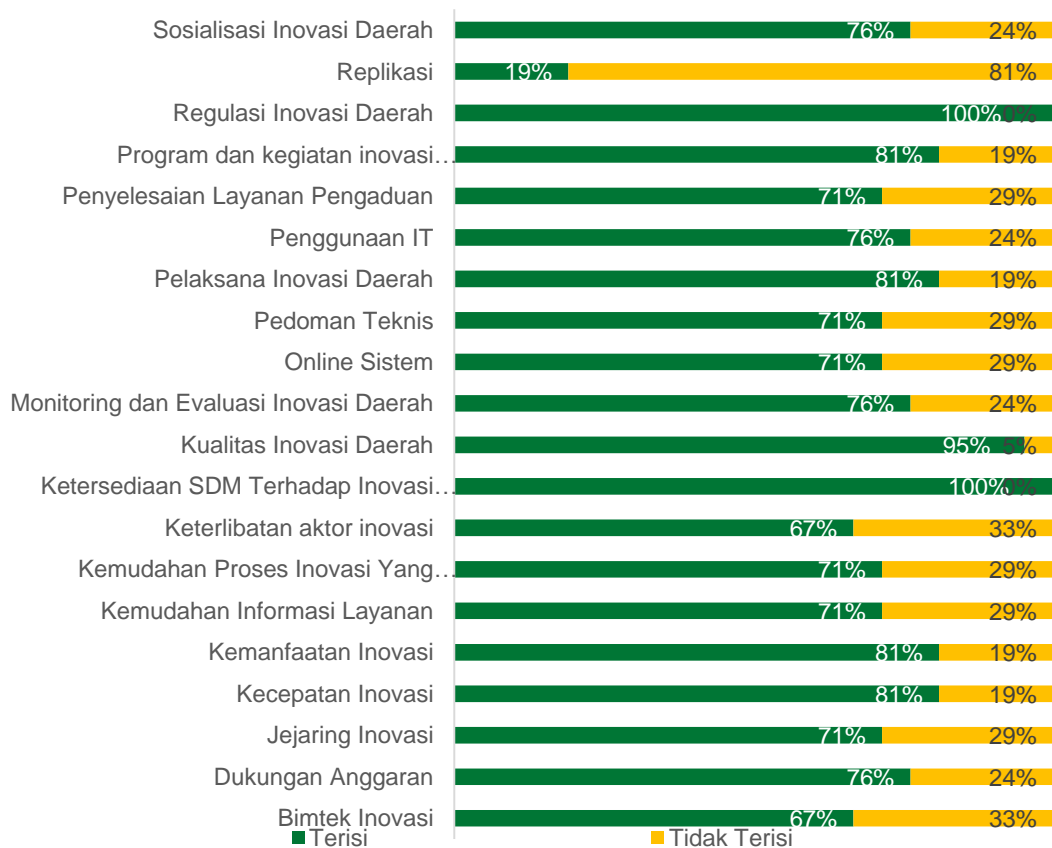
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tana Tidung

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Sebanyak 9 (42,86%) inovasi dari 21 inovasi sudah termasuk kategori skor kematangan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan tergolong ke dalam skor kematangan tinggi. Selanjutnya, terdapat proporsi yang sama antara inovasi dengan skor kematangan sedang dan rendah, di mana terdapat masing-masing 6 (28,57%) inovasi yang termasuk ke dalam kedua kategori tersebut. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

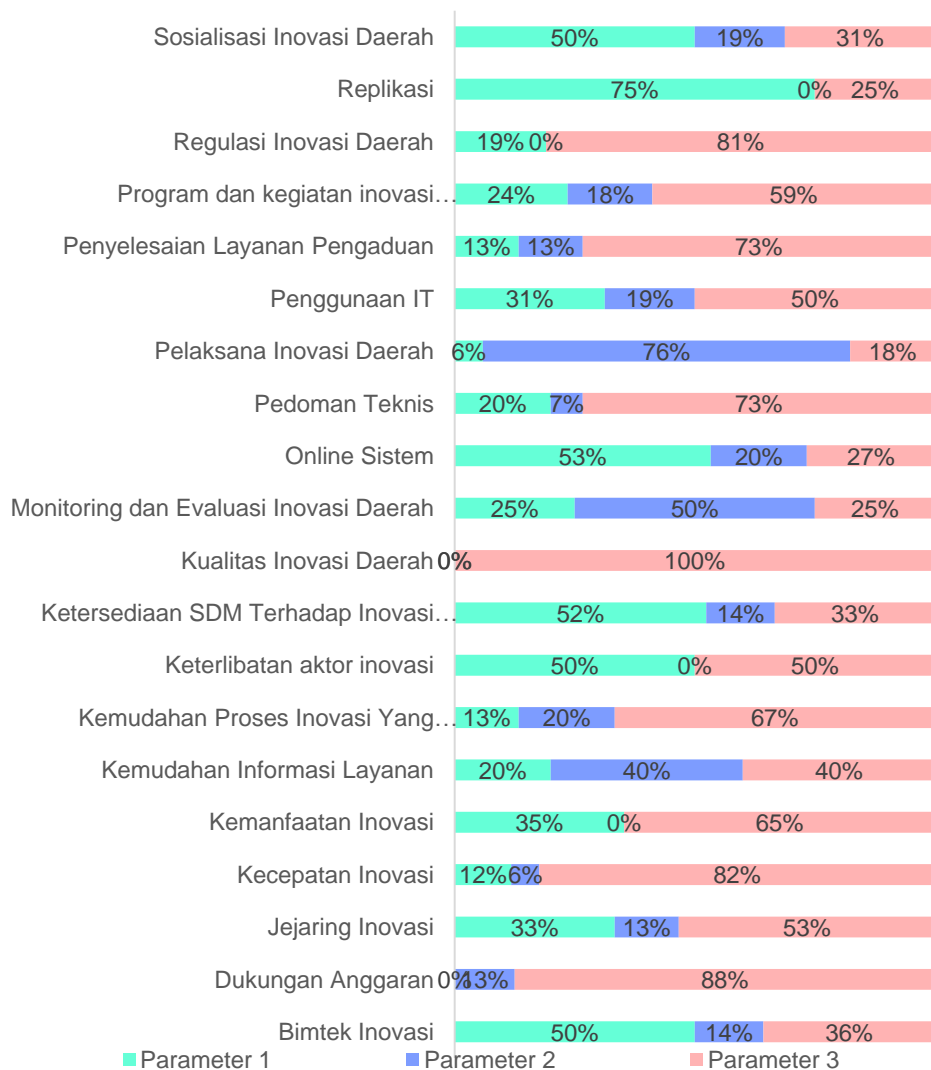
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Tidung

Dari 21 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tana Tidung, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 24,76% sedangkan 75,24% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan sudah terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tana Tidung telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 19%. Dengan kata lain, hanya 19% inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

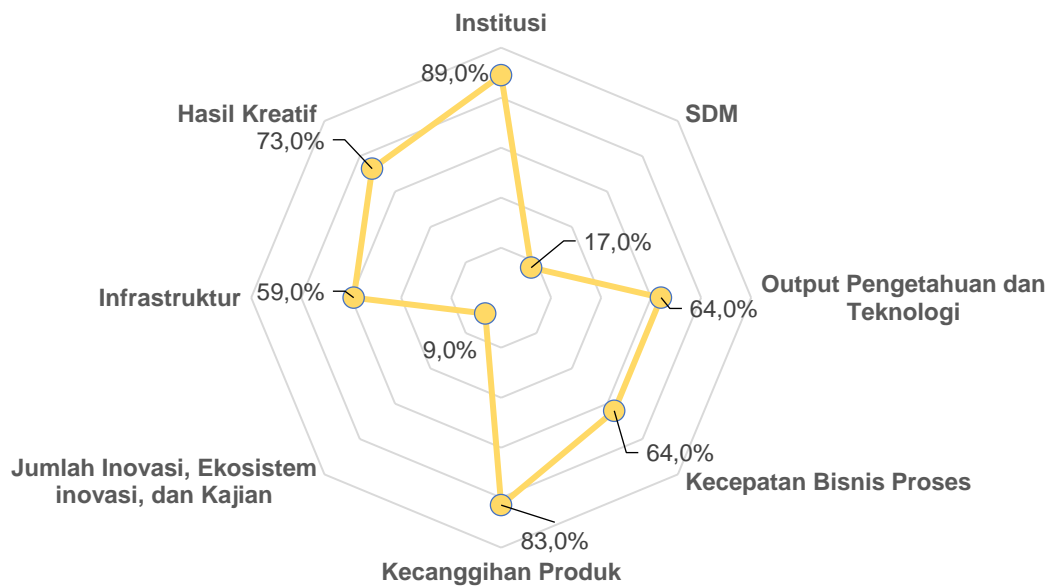
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Kualitas Daerah, yaitu sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 76%. Dengan kata lain, 76% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yakni sebesar 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 75% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Tana Tidung beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Tana Tidung beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
penerapan protokol Covid19 (Lokasi wisata) C19	69
penerapan protokol covid19 di penginapan/hotel C19	29
New Normal Protokol Covid19 (Transportasi Umum)-C19	29
New Normal protokol Covid19 (Pasar Tradisional)-C19	81
New Normal protokol Covid19 (Pelayanan Perizinan)-C19	29
Pelayanan Terpadu Identitas Anak CERIA (Cermat, Efisien, Ramah dan InstAn)	116
Simda Barang Persediaan (SIBAPER)	96
SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SIMPEL PAKEL)	130
Lembar Aktivitas Siswa Berbasis Literasi (BAISS)	136
starter lokal sebagai probiotik (Star Lo Si Pro)	111
Sipedet (Sitem Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Terpadu)	121
SIMDALEV (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi)	88
Sistem informasi data & dokumentasi kepegawaian terintegrasi (SIDOKTER)	137
SAINSNOPOLY	58
GARIS MATEMATIKA (RISTIKA)	47
Pembelajaran Luar Ruang (PELUANG)	45
Pelayanan Terpadu di KUA Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Yandu Bais)	116
PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH BERBASIS 3R (LAPAS 3R)	130
Watermark Logo Kominfo dan Alamat Media Sosial Diskominfo Kabupaten Tana Tidung (KOIN AMAL DISKOMINTI)	99
Sistem Pengarsipan Berita Persandian (SISIP BENDI)	14
Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (SIPAH)	130

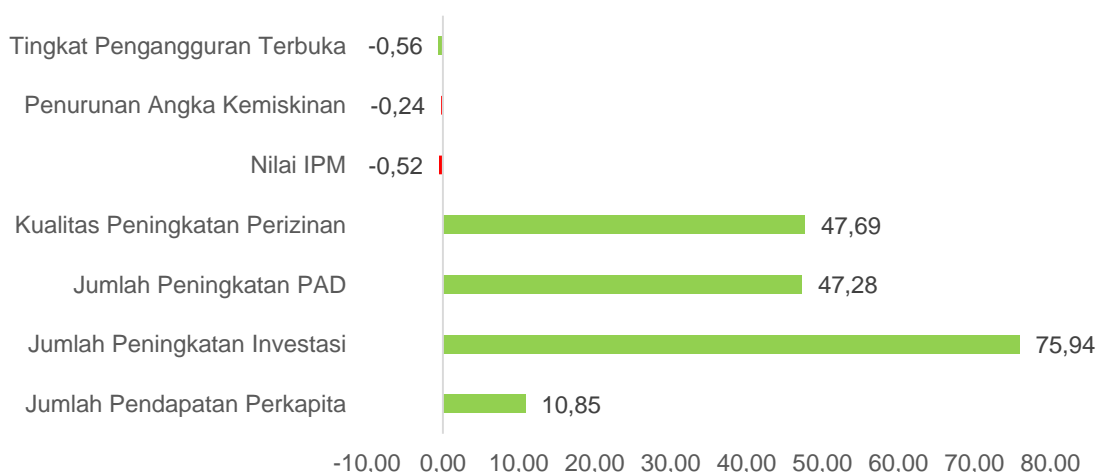
E. KOTA TARAKAN



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tarakan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Tarakan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 89,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yakni sebesar 9%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih belum tercapai atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tarakan

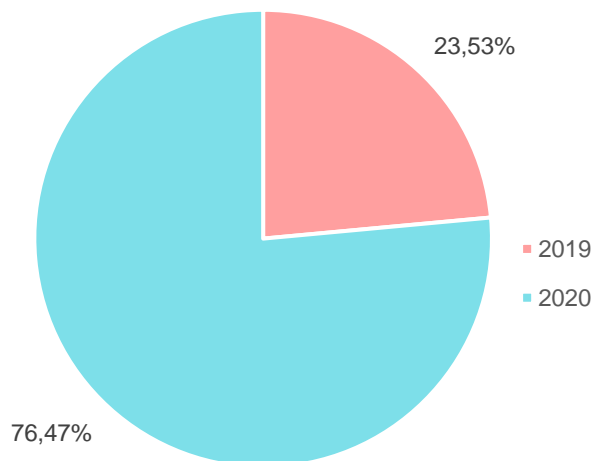
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas

dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tarakan cukup mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagan tersebut menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Angka tersebut belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0,02%. Selanjutnya, nilai IPM juga terpantau turun sebesar 0,52%. Angka tersebut juga belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana IPM tidak mengalami perubahan.

Selain kedua indikator tersebut, beberapa indikator lainnya sudah mengalami pencapaian yang cukup baik meskipun masih terdapat satu indikator yang mengalami penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,56%, yang berarti bahwa tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 0,56% dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan standar di mana indikator tersebut naik sebesar 0,92%. Lebih lanjut, Jumlah Pendapatan Perkapita tercatat naik sebesar 10,85%, di mana peningkatan tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Pendapatan Perkapita turun sebesar 1,85%. Jumlah Peningkatan PAD juga meningkat secara signifikan, yakni sebesar 47,28%, di mana sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yaitu meningkat sebanyak 8%. Demikian pula dengan Kualitas Peningkatan Perizinan, yang juga mengalami kenaikan sebesar 47,69%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%, capaian Kota Tarakan pada indikator tersebut sudah melampaui standar yang ditentukan. Adapun indikator Jumlah Peningkatan Investasi merupakan indikator dengan peningkatan yang paling signifikan di Kota Tarakan. Jumlah Peningkatan Investasi terpantau meningkat sebanyak 75,94%, di mana sudah sangat melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Sebagai informasi, standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang ditentukan adalah meningkatnya Jumlah Peningkatan Investasi sebanyak 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

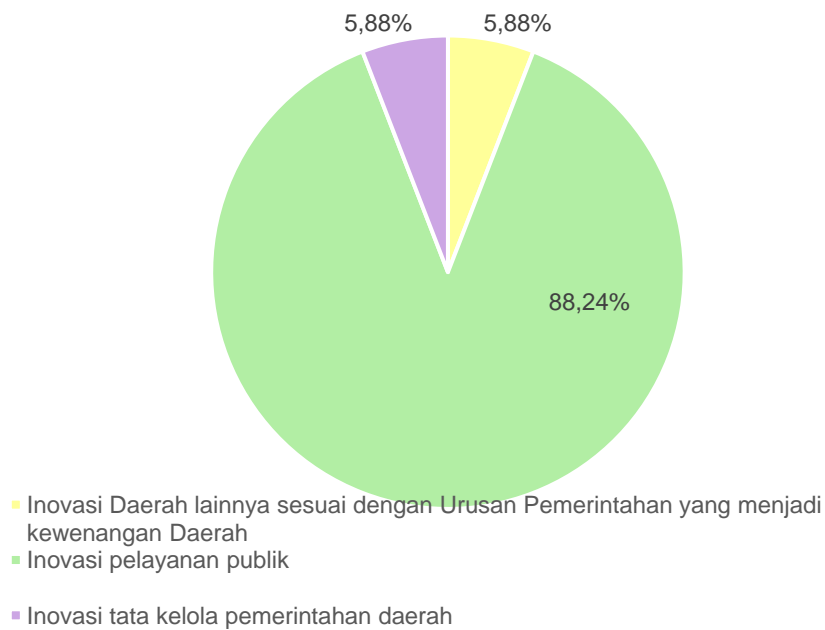
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Tarakan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tarakan telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 13 (76,47%) inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 4 (23,53%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

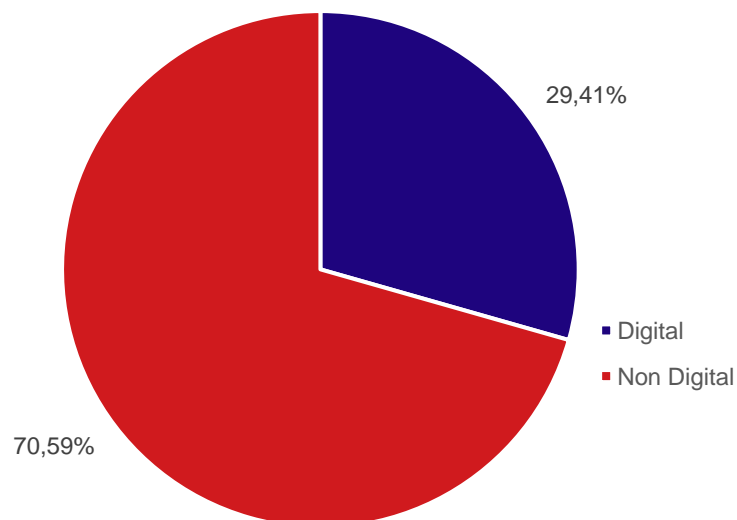
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Tarakan

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tarakan sudah mencakup seluruh jenis inovasi. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 15 (88,24%) inovasi dari 21 inovasi. Sementara itu, 2 inovasi sisanya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya, dengan jumlah inovasi pada masing-masing kategori adalah sebanyak 1 inovasi (5,88%).

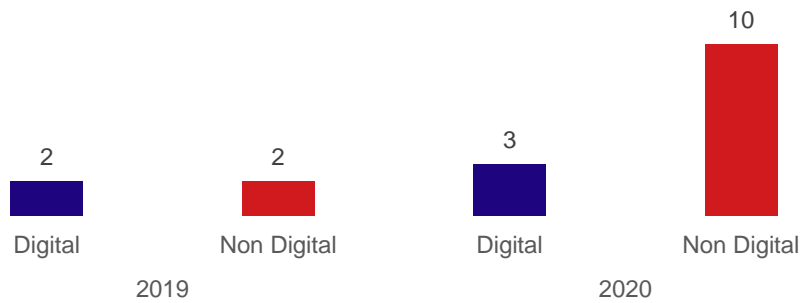
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Tarakan

Jika melihat jenis inovasinya, Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 yang dilaporkan oleh Kota Tarakan terdiri atas Inovasi Digital dan Inovasi Non Digital. Dari 17 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Tarakan, sebagian besar di antaranya merupakan inovasi non digital, yaitu sebanyak 12 (70,59%) inovasi. Sementara itu, 5 (29,41%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital.

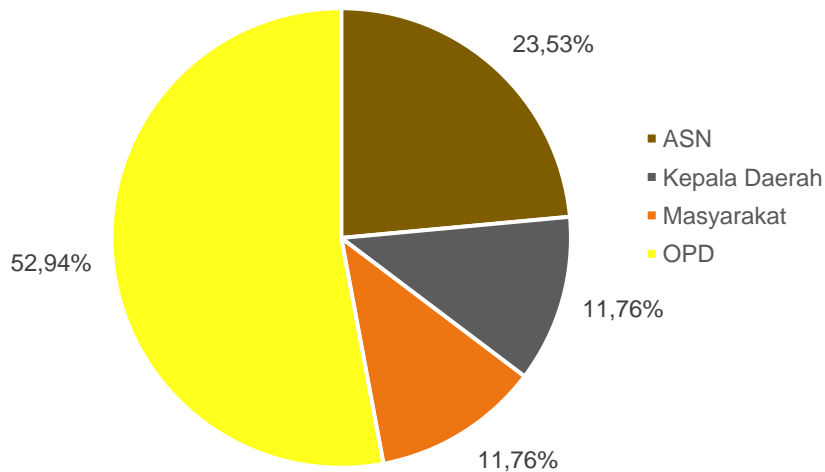
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Tarakan

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Inovasi digital terlihat mengalami sedikit peningkatan, di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah sedikit menjadi 3 inovasi. Di sisi lain, inovasi non digital mengalami kenaikan yang signifikan, di mana pada tahun 2019 terdapat 2 inovasi non digital yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 bertambah pesat menjadi 10 inovasi digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

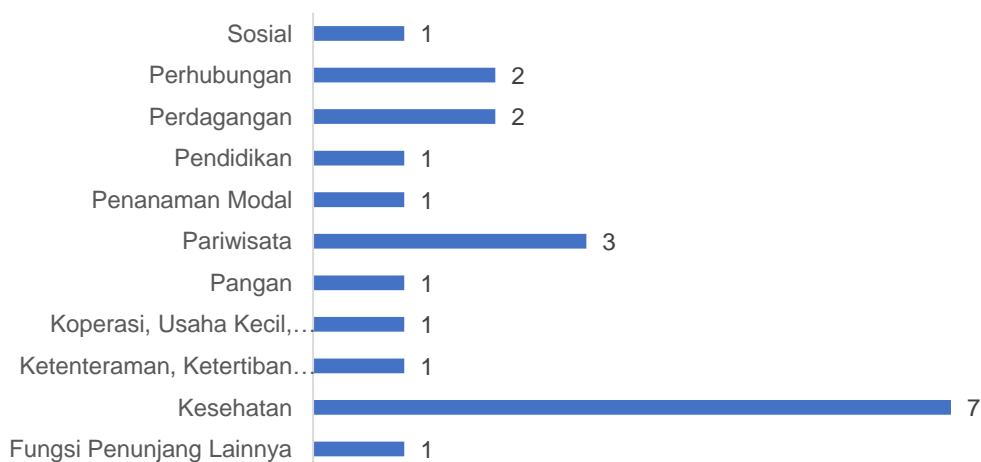


Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Tarakan

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi pada Kota Tarakan diinisiasi oleh empat unsur, di antaranya adalah ASN, Kepala Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Tarakan pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sejumlah 9 (52,94%) inovasi. Selanjutnya, 4 (23,53%) inovasi diinisiasi oleh ASN dan 4 inovasi sisanya diinisiasi oleh Masyarakat dan Kepala Daerah

dengan jumlah masing-masing sebanyak 2 inovasi (11,76%). Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

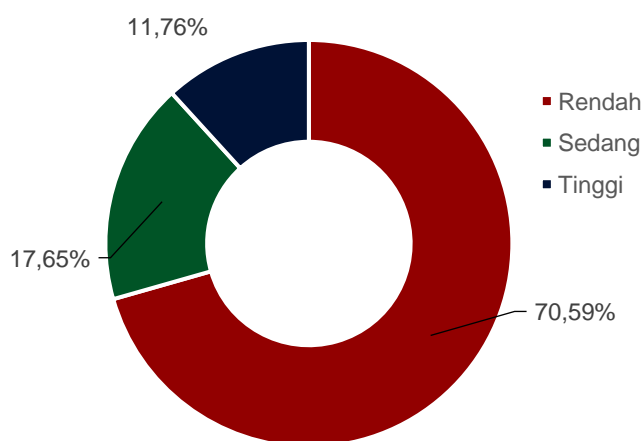
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Tarakan

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kota Tarakan tersebar pada 11 urusan berbeda. Urusan Kesehatan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 7 inovasi. Selanjutnya, terdapat 3 inovasi yang merupakan urusan Pariwisata. Adapun jumlah inovasi dalam urusan Perhubungan dan Perdagangan adalah sebanyak 2 inovasi pada masing-masing urusan. Sementara itu, 7 urusan sisanya memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi pada masing-masing urusan, yaitu pada urusan Sosial, Pendidikan, Penanaman Modal, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Fungsi Penunjang Lainnya.

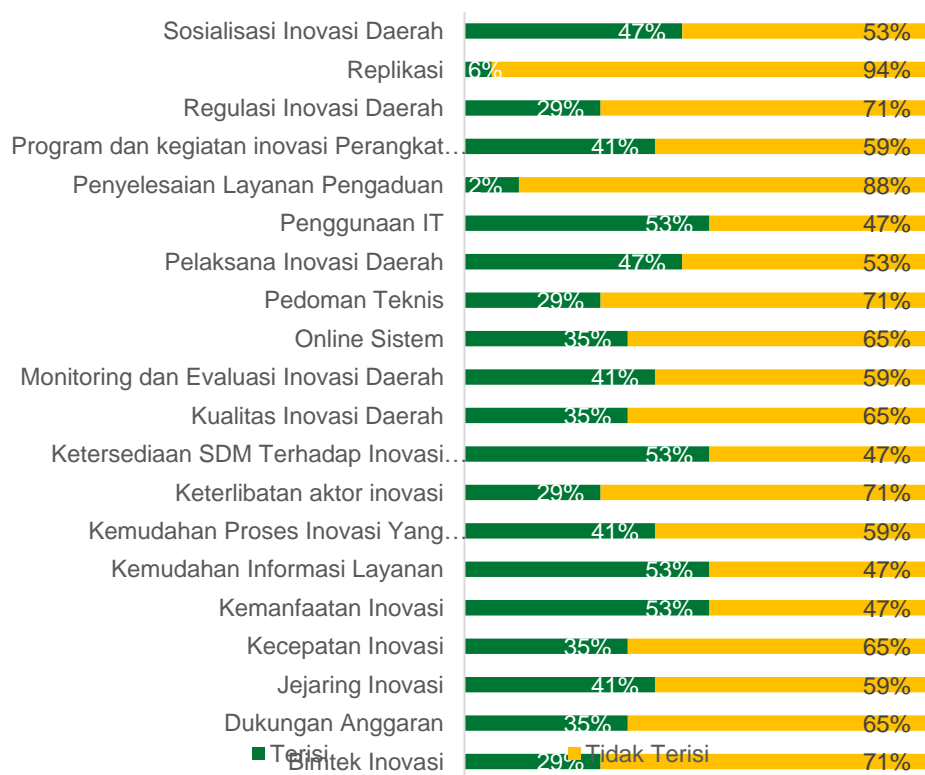
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Tarakan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tersebar pada seluruh tingkat skor kematangan, yang meliputi skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tarakan memiliki skor kematangan yang rendah, yakni sebanyak 12 (70,59%) inovasi dari 17 inovasi. Sebaliknya, 3 (17,65%) inovasi memiliki skor kematangan sedang dan 2 (11,76%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan yang tinggi. Banyaknya inovasi yang termasuk dalam skor kematangan rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan masih perlu melakukan evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang dilaporkan, khususnya inovasi yang masih memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

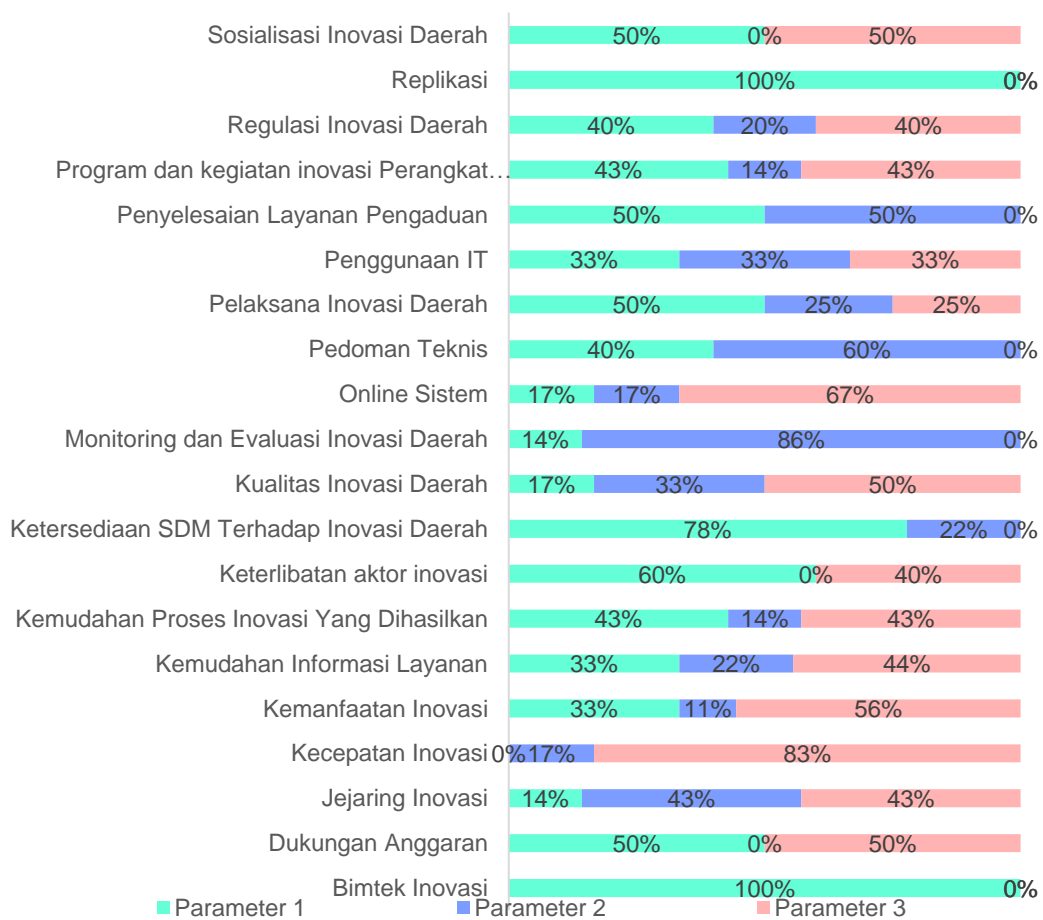
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Tarakan

Dari 17 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tarakan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 62,65% sedangkan 37,35% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, sebagian besar inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data-data pendukung yang diperlukan. Adapun indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah Indikator Penggunaan IT, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing 53%. Artinya, sekitar setengah inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tarakan telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Di sisi lain, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 6%. Dengan kata lain, hanya 6% inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Kecepatan Inovasi, yaitu sebesar 83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 83% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 86%. Dengan kata lain, 86% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Bimtek Inovasi yakni sebesar 100%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Tarakan beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kota Tarakan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pasar Tradisional Boom Panjang Produktif Bebas Covid 19	0
MINI MARKET SEHAT BEBAS COVID- 19	0
HOTEL NYAMAN DAN SEHAT BEBAS COVID-19	0
New Normal Protection One Stop Service	0

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Wisata Bersejarah Bebas Covid	0
Protokol Sehat Pelabuhan Ferry Juata Laut	0
Nongki Asik Ala New Normal	0
Layanan Mobile Jemput Sampel DAMIU	25
PROGRAM PERKESMAS TERPADU 'KAMPUNG MANDIRI DAN SEHAT' DISINGKAT "KAMPUNG MANIS"	36
PPDB Online Sebuah Tantangan Alih Teknologi Dalam Peningkatan Layanan PPDB	22
GETAR (Gerai Jumat Bugar)	30
SINOVI (SISTEM INFORMASI VISUAL	21
ASMIRANDAH (ANTAR SAMPEL AIR SEMAKIN MUDAH)	52
Tarakan Siaga 112	116
APEM MANIS (Aplikasi Elektronik Melayani Masyarakat Tertangani Segera)	109
Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKUDA)	60
e-Parkir	60

The Page Left is Blank

BAB III

PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Kalimantan Utara terdapat 4 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. KABUPATEN BULUNGAN

Kabupaten Bulungan memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 51,15. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Utara juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bulungan melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 25,39. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Malinau melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

C. KABUPATEN NUNUKAN

Kabupaten Nunukan memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 29,35. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Nunukan melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

D. KABUPATEN TANA TIDUNG

Kabupaten Tana Tidung memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 47,38. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Utara juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Tana Tidung melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. KOTA TARAKAN

Kota Tarakan memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 30,73. Maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Utara juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Tarakan melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.